

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Konseptual

2.1.1 Implementasi

Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Adapun pengertian implementasi tersebut dapat dilihat dalam beberapa pendapat di bawah ini.

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan- perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

- 1) Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
- 2) Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.

- 3) Ketersediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
- 4) Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
- 5) Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
- 6) Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

- 1) Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
- 2) Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
- 3) Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015:45): “Those Activities directed toward putting a program into effect” (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter: “Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy” (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Selanjutnya menurut Lister (Taufik dan Isril, 2013:136), “sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan”.Grindle (Mulyadi, 2015:47), “menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”.

Sedangkan Horn (Tahir, 2014:55), “mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

2.1.2 Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Pengertian kebijakan (Policy) adalah asas atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Dalam setiap perumusan kebijakan publik diawali dengan perumusan masalah yang telah diidentifikasi kemudian implementasi kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat.

Kebijakan Publik menurut Robert Eyestone (1971; 18), “bahwa secara garis besar kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Kebijakan Publik menurut Thomas R. Dye (1975; 1), “Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Public policy adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan)”. Pakar ilmu politik lainnya, Carl

Friedrich mengatakan bahwa; “Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diajukan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan dan peluang bagi kebijaksanaan yang diusulkan itu untuk digunakan dan diatasi guna mencapai suatu tujuan, atau mewujudkan suatu sasaran atau tujuan tertentu” (Budi Winarno, 2022; 16).

James Anderson (1984:3) memberikan pengertian tentang pengertian kebijakan publik, dalam bukunya *Public Policy Making*, sebagai berikut; “rangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilakukan oleh pelaku atau sekelompok pelaku yang dianggap.” Konsep kebijakan berfokus pada apa yang sebenarnya dilakukan daripada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. (Leo Agustino.2008:7). James Anderson (1979; 4) juga mengatakan bahwa secara umum istilah “kebijakan” atau “kebijakan” digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor (misalnya pejabat, kelompok, atau lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam bidang kegiatan tertentu. Kebijakan publik adalah keputusan politik yang dikembangkan oleh lembaga dan pejabat pemerintah. Oleh karena itu, ciri khusus kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik dirumuskan oleh apa yang oleh David Easton (1965:212) disebut sebagai “otoritas” dalam sistem politik, yaitu: senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislator, hakim, administrator, penasihat, raja-raja, dan sebagainya.” Easton mengatakan bahwa mereka yang berwibawa dalam sistem politik dalam rangka perumusan kebijakan publik adalah: orang-orang yang sehari-hari terlibat dalam urusan sistem politik dan memiliki tanggung jawab atas suatu isu tertentu dimana pada suatu saat diminta

untuk mengambil keputusan di kemudian hari. diterima dan mengikat sebagian besar anggota masyarakat untuk waktu tertentu. (Leo Agustino. 2008: 8)

Berdasarkan beberapa definisi mengenai kebijakan publik, terdapat beberapa ciri yang dapat disimpulkan. Pertama, kebijakan publik umumnya terfokus pada tindakan yang memiliki maksud atau tujuan tertentu daripada perubahan atau perilaku acak. Kedua, kebijakan publik pada dasarnya mempunyai landasan yang memuat bagian-bagian atau pola-pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan-keputusan yang terpisah-pisah. Ketiga, kebijakan publik adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau menawarkan perumahan umum, bukan apa yang dimaksudkan untuk dilakukan atau akan dilakukan. Keempat, kebijakan publik dapat bersifat positif atau negatif. Kelima, kebijakan publik, setidaknya berdasarkan hukum secara positif dan merupakan perbuatan yang bersifat mengatur (Leo Agustino. 2008; 7-9).

Suatu kebijakan publik memiliki hubungan yang erat antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan masyarakat yang berkepentingan dengan kebijakan tersebut. M. Irfan Islamy menjabarkan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu:

- 1) Bahwa kebijakan publik berupa peraturan adalah berupa tindakan pemerintah.
- 2) Bahwa kebijakan publik tidak cukup hanya diwacanakan, tetapi diimplementasikan dalam bentuk nyata.

- 3) Kebijakan publik itu baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang mempunyai dan didasarkan pada maksud dan tujuan tertentu.
- 4) Bahwa kebijakan publik harus selalu ditujukan untuk kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Keterlibatan aktor dalam perumusan kebijakan merupakan ciri khusus dari kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena kebijakan yang dirumuskan menurut David Easton (Miftah Thoha, 2003:62) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah alokasi nilai otoritatif untuk seluruh masyarakat, akan tetapi hanya pemerintahlah yang dapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari alokasi nilai-nilai tersebut.

Oleh karena itu, pengertian kebijakan publik akan lebih tepat jika pengertian tersebut juga mencakup arah tindakan atau apa yang sedang dilakukan dan tidak semata-mata menyangkut tindakan yang diusulkan serta kebijakan publik merupakan tindakan yang penting dalam segala bidang sebagai peraturan hidup yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dan yang wajib dilaksanakan. dibuat sesuai dengan kebutuhan dan keadaan secara bijaksana sehingga dapat diikuti oleh masyarakat secara baik dengan kebijakan yang wajar, dapat mewujudkan ketenteraman dan ketertiban.

Karena kebijakan publik menentukan bentuk kehidupan setiap bangsa dan negara. Semua negara menghadapi masalah yang relatif sama, yang berbeda adalah bagaimana mereka menyikapi masalah tersebut. Tanggapan ini disebut kebijakan publik. Karena kebijakan publik merupakan domain negara atau pemerintah, atau

kekuasaan pemegang negara, maka kebijakan publik merupakan bentuk faktual dari setiap upaya pemerintah untuk mengatur kehidupan bersama yang disebut negara dan bangsa. Keunggulan masing-masing negara semakin ditentukan oleh kemampuan negara tersebut untuk mengembangkan kebijakan publik yang unggul.

2.1.3 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Udijo (1981;32), dengan tegas mengatakan bahwa *"the execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented"* (Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting. Bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan)". Dengan kata lain pembuatan kebijakan tidak berakhir setelah kebijakan ditentukan atau disetujui.

Implementasi kebijakan merupakan langkah lanjut berdasarkan suatu kebijakan formulasi. Menurut Wahab, (1997;63) "Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan". Dunn (1981;56), menyatakan bahwa akan halnya "implementasi kebijakan, lebih bersifat kegiatan praktis, termasuk didalamnya mengeksekusikan dan mengarahkan. Suatu konteks implementasi demikian baru akan terlihat pengaruhnya setelah kebijakan tersebut dilaksanakan. Hal itulah yang menunjukkan bahwa proses pelaksanaan kebijakan

merupakan salahsatu tahapan penting dan momentum dalam proses perumusan/pembuatan kebijakan selanjutnya, sebab berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya ditentukan dalam pelaksanaannya”.

Oleh karena itu, rumusan kebijakan yang telah dibuat akan mempunyai arti apa-apa atau hanya akan merupakan rangkaian kata-kata indah dan baku yang tersimpan rapi dalam sebuah dokumen kalau tidak diimplementasikan. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa salah satu tolak ukur keberhasilan suatu strategi atau kebijakan terletak pada proses implementasinya. Implementasi kebijakan dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan dan mengoperasionalkan program-program pemerintah yang telah dirancang sebelumnya.

2.1.4 Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan dalam perspektif alur proses/ siklus kebijakan publik, menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan, sehingga sudah sewajarnya jika kebijakan publik yang telah dibuat dan dilaksanakan lalu dievaluasi. Karena dari evaluasi akan diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan, sehingga secara normatif akan diperoleh rekomendasi apakah kebijakan dapat dilanjutkan; atau perlu perbaiki sebelum dilanjutkan, atau bahkan harus dihentikan. Suatu kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi dan salahsatu mekanisme pengawasan tersebut evaluasi kebijakan. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. (Nugroho,2004).

Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Oleh karena itu, evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas sesuatu fenomena didalamnya terkandung pertimbangan nilai (valuejudgment) tertentu. (Mustopadidjaja, 2002:45). Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/atau target kebijakan publik yang ditentukan (Muhajir, 1996).

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak (Anderson; 1975). Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu aktifitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil kebijakan pemerintah yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat penting dalam spesifikasi objeknya, teknik-teknik pengukurannya, dan metode analisisnya. (Subarsono, 2005).

Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat diatas terkait evaluasi kebijakan yakni, evaluasi kebijakan merupakan tahapan akhir dari kegiatan yang dilakukan guna untuk menentukan penilaian yang berakhir baik atau tidak sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas, dan dapat melakukan kegiatan yang lebih baik untuk kedepannya.

Maka dari itu evaluasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat urgent dalam kebijakan publik, dikarenakan untuk mengukur implementasi dari kebijakan publik tersebut, apakah sudah tercapai dan sesuai dengan harapan atau masih menimbulkan banyak masalah pada target group itu sendiri. Disisi lain, banyak dari

kebijakan publik yang telah dikeluarkan oleh pemerintah umum tidak membawa dampak (impact) yang cukup berpengaruh bagi seluruh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu.

2.2 Pemerintahan

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “Perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terdukung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Apabila dalam suatu negara kekuasaan pemerintahan, dibagi atau dipisahkan maka terdapat perbedaan antara pemerintahan dalam arti luas dengan pemerintahan dalam arti sempit. 23UUD No 10 Tahun 2009 Pasal 14 ayat 1 Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (disebut legislatif) dan yang melaksanakan peradilan (Yudikatif), (Inu Kencana Syafii, 2017:20).

Menurut Budiardjo. (2003;21) “Pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara, rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara dan memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut”.

Maka definisi pemerintahan menurut beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwasannya; pemerintahan merupakan penggerak yang terorganisir yang memiliki kewenangan, kekuasaan, kebijakan, yang berfungsi untuk melayani dalam

memenuhi kebutuhan masyarakat, kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tujuan yang sama.

Fungsi Pemerintahan menurut Riyas Rasyid (2000:59) dibagi menjadi empat bagian yakni:

- 1) Fungsi Pelayanan (Public Service)
- 2) Fungsi Pembangunan (Development)
- 3) Fungsi Pemberdayaan (Empowering)
- 4) Fungsi Pengaturan (Regulatorr)

Salah Satu fungsi pemerintah diatas yakni sebagai pengaturan sebagaimana yang dikemukakan oleh Riyaas Rasyid (2010) peran dari pemerintah yakni:

- 1) Pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal ke masyarakat.

- 2) Pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pembangunan.

Dapat kita simpulkan bahwasannya pemerintah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dimana yang mengatur, mengurus segala urusan Negara dengan tertata dan terorganisir untuk melayani masyarakat atau warga negaranya untuk mencapai apa yang menjadi keinginannya dan sebagai pengelola kebijakan dalam pembangunan infrastruktur untuk mencapai kesejahteraan bersama. Sehingga tidak serta merta dibebankan terhadap masyarakat, sebagai tanggung jawab dan perannya.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul Penelitian	Universitas	Tahun
Agaba Halidu, PHD	<i>Governance, Leadership and The Political and Economic Development of Rwanda Under Paul Kagame: An Analysis</i>	University Of Abuja	2022
Balthazar Nizeyimana	<i>Civil society organizations in the public policy process in Rwanda</i>	University of Rwanda	2013

Hasil penelitian pertama menyimpulkan bahwa Kisah sukses Rwanda telah menjadi contoh yang dijadikan acuan oleh negara-negara lain. Pemerintah Afrika tengah mencari cara untuk mengembangkan ekonomi dan mencapai perdamaian politik. Pemerintah Rwanda telah melakukan langkah-langkah yang memudahkan para investor untuk masuk ke negara tersebut, yang berujung pada peningkatan investasi asing langsung. Dengan mempercepat proses hukum terkait pendirian,

operasional, dan pengakhiran bisnis, pemerintah Rwanda berupaya untuk memenuhi tuntutan para investor, usaha kecil dan menengah, serta pihak lainnya.

Meskipun demikian, beberapa masalah politik dan sosial masih belum terselesaikan. Krisis di negara tetangga Kongo dan dukungan pemerintah Kigali terhadap pemberontak bersenjata terus menjadi perhatian internasional. Selain itu, pelanggaran HAM dan penindasan terhadap pemimpin oposisi terus menghantui citra politik Rwanda. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk melindungi hak-hak minoritas, mengakhiri represi terhadap pers dan lawan politik, serta meningkatkan investasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan melakukan upaya ini, diharapkan Rwanda dapat mengatasi tantangan politik dan sosial yang masih ada, sambil memperkuat fondasi pembangunan ekonomi dan menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan inklusif bagi seluruh warganya.

Hasil penelitian kedua menyimpulkan bahwa telah dilakukan evaluasi terhadap peran organisasi masyarakat sipil dalam kebijakan publik di Rwanda melalui studi kasus Rwanda Civil Society Platform. Penelitian ini dikonseptualisasikan dengan tiga tingkat analisis yang berbeda. Analisis pertama berfokus pada kegiatan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil dengan tujuan mempengaruhi kebijakan publik dan tingkat interaksi dengan pemangku kepentingan lainnya. Analisis kedua berhubungan dengan kapasitas internal organisasi masyarakat sipil dalam proses kebijakan publik. Sedangkan analisis ketiga melibatkan identifikasi tantangan dan peluang yang terkait dengan formulasi dan adopsi kebijakan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi. Dalam penelitian

ini, digunakan metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa peran masyarakat sipil dalam proses kebijakan publik di Rwanda masih rendah.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran untuk menjelaskan kebijakan publik Rwanda Vision 2020 pada masa pemerintahan Paul Kagame dapat dibagi menjadi tiga elemen utama: konteks, tujuan, dan implementasi. Rwanda Vision 2020 adalah inisiatif pembangunan jangka panjang yang dirancang untuk mencapai perkembangan yang berkelanjutan di berbagai sektor, dan kebijakan tersebut dikelola dan dilaksanakan selama pemerintahan Paul Kagame. Konteks kebijakan ini mencakup latar belakang sejarah Rwanda dan tantangan yang dihadapi pada masa itu. Pada awal 1990-an, Rwanda mengalami genosida yang mengakibatkan kerusakan besar-besaran, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun politik. Pemerintahan Paul Kagame muncul setelah genosida dan dihadapkan pada tugas yang besar untuk merekonstruksi negara yang hancur. Konteks ini menciptakan landasan untuk merumuskan visi jangka panjang, yaitu Rwanda Vision 2020.

Rwanda Vision 2020 memiliki enam pilar utama yang mencerminkan aspirasi pemerintah untuk membangun kembali dan mengembangkan Rwanda sebagai negara yang kuat dan berkelanjutan. Keenam pilar tersebut adalah:

- 1) Tata Laksana Pemerintahan Yang Baik: Mengutamakan upaya rekonsiliasi untuk menyatukan masyarakat yang terpecah akibat genosida, membangun

kepercayaan antar etnis, dan menciptakan landasan yang kokoh untuk kehidupan bersama.

- 2) Negara Yang Efisien : Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui diversifikasi ekonomi, investasi dalam sektor pertanian dan industri, serta pengembangan sumber daya manusia untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.
- 3) Sumber Daya Manusia yang Terampil: Fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan.
- 4) Sektor Swasta Yang Aktif: Bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan pengembangan sektor swasta yang dinamis dan kompetitif. Dengan mendorong peran serta sektor swasta, Rwanda berharap dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada bantuan luar negeri.
- 5) Infrastruktur Fisik Kelas Dunia: Berfokus pada pengembangan dan modernisasi infrastruktur fisik yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menjadikan Rwanda sebagai pusat bisnis dan investasi di kawasan
- 6) Pertanian dan Peternakan Modern: Bertujuan untuk mentransformasi sektor pertanian dan peternakan Rwanda dari praktik subsisten tradisional menjadi kegiatan ekonomi yang produktif, berkelanjutan, dan berorientasi pasar.

Implementasi kebijakan melibatkan dalam merinci langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini mencakup perancangan kebijakan,

alokasi anggaran, pembentukan lembaga dan mekanisme pengawasan, serta pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Pemerintah Rwanda melibatkan sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan mitra internasional dalam implementasi kebijakan ini.

Kerangka pemikiran ini membantu dalam memahami landasan, tujuan, dan langkah-langkah yang diambil dalam implementasi Rwanda Vision 2020 di bawah kepemimpinan Paul Kagame. Dengan fokus pada rekonsiliasi nasional, pembangunan ekonomi, transformasi sosial, dan pemberantasan korupsi, Rwanda berusaha mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif.

Gambar 2.1
Kerangka Penelitian

